

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat keberagaman tinggi. Ini tercermin dalam kegiatan keagamaan yang dilaksanakan masing-masing umat, termasuk dalam pengelolaan administrasi dan keuangan rumah ibadah masing-masing agama.

Entitas nonlaba adalah lembaga yang mendapatkan sumber dana dari pemberi sumber dana tanpa harapan mendapatkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang setara dengan jumlah sumber dana yang diberikan. (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2022). Salah satu contoh entitas nonlaba di Indonesia yang bergerak di bidang keagamaan adalah Gereja. Sumber dana yang ada pada pelayanan gereja berasal dari masyarakat. Maka dari itu gereja bertanggung jawab untuk mengelola keuangan yang diberikan.

Sejarah Gereja Protestan di Indonesia dimulai pada abad ke-17, saat Belanda datang melalui *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC). VOC membawa serta agama Kristen beraliran reformasi *Calvinis*, dan mendirikan Gereja Protestan di Indonesia (GPI) yang dikelola langsung oleh pemerintah kolonial. Gereja ini terutama berfungsi melayani pegawai VOC dan sedikit menjangkau pribumi. Setelah VOC bubar, tahun 1815 didirikan *Indische Kerk* atau dalam terjemahan bahasa Indonesia adalah Gereja Protestan Hindia Belanda, sebagai lembaga resmi gereja negara. Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, misi zending dari Eropa dan

Amerika mulai menjangkau suku-suku lokal, seperti Batak, Minahasa, Timor, dan Papua. Setelah Indonesia merdeka, gereja-gereja Protestan di berbagai daerah memisahkan diri menjadi gereja mandiri berdasarkan suku dan wilayah, misalnya HKBP, GMIM, GKJ, GMIT, dan lain-lain. Gereja Protestan kemudian berkembang luas dan menjadi salah satu kekuatan utama dalam kekristenan di Indonesia (Aritonang, 2010).

Kegiatan penerimaan dan pengeluaran pada Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) merupakan bagian penting dari proses pengelolaan keuangan gereja yang mendukung keberlangsungan pelayanan. Penerimaan dana umumnya berasal dari persembahan minggu, persembahan khusus, persembahan syukur, sumbangan sukarela jemaat, bantuan dari pihak ketiga, serta pendapatan lain yang sah sesuai peraturan gereja. Dana yang diterima tersebut digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pembiayaan operasional gereja, pemeliharaan gedung ibadah, kegiatan pelayanan rohani, program pendidikan, bantuan sosial, dan kegiatan misi. Proses pengeluaran dilakukan berdasarkan anggaran yang telah disetujui melalui rapat majelis atau sinode, sehingga setiap penggunaan dana memiliki dasar keputusan yang jelas (Simanjuntak, 2019).

Bentuk penyalahgunaan dana gereja terjadi dalam kasus dana hibah kepada Sinode GMIM di Sulawesi Utara, di mana audit BPK menemukan bahwa dana hibah sebesar Rp 8,9 miliar (periode 2020–2023) digunakan tidak sesuai prosedur dan menyebabkan kerugian negara senilai Rp 8,9 miliar. Polda Sulut bahkan telah menetapkan lima orang tersangka dari kalangan pejabat provinsi dan pihak gereja terkait kasus ini (Alfrits, 2025).

Organisasi nirlaba mendapat sumber dana dari donatur yang tidak mengharapkan imbal balik atau fungsi ekonomi yang setara dengan yang diterima. Contoh organisasi nirlaba di bidang keagamaan yang melayani masyarakat adalah gereja. Sumber dana yang ada pada gereja berasal dari masyarakat. Maka dari itu gereja bertanggung jawab untuk mengelola keuangan yang diberikan ke gereja. (Erik Trisnawati et al., 2022)

Laporan penerimaan dan pengeluaran merupakan dokumen yang menyediakan rangkuman transaksi keuangan sebuah entitas dalam periode waktu tertentu (Ismail, 2024). Organisasi nonlaba, termasuk rumah ibadah sering menghadapi berbagai hambatan dalam menyusun laporan penerimaan dan pengeluaran secara tepat dan sesuai standar. Kendala utama adalah kekurangan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang akuntansi. Selain itu, sistem pencatatan yang bersifat manual menyebabkan risiko kesalahan, kehilangan data, serta keterlambatan dalam penyajian laporan. Hambatan-hambatan tersebut menunjukkan perlunya inovasi dalam pengelolaan keuangan organisasi nonlaba, khususnya rumah ibadah. Salah satu solusi yang bisa digunakan ialah pemanfaatan teknologi sistem informasi keuangan berbasis website. Sistem ini memungkinkan pencatatan transaksi, pengelolaan data, dan penyajian laporan keuangan dilakukan secara terintegrasi dan *real time*, sehingga mengurangi risiko kesalahan serta keterlambatan pelaporan. Selain itu, akses berbasis *website* memungkinkan pengurus dan pihak yang berwenang memantau kondisi keuangan kapanpun dan di manapun, tanpa dibatasi lokasi fisik. Implementasi sistem informasi keuangan berbasis *website* pada organisasi nonlaba diharapkan tidak hanya mempermudah

administrasi. Tetapi juga meningkatkan kepercayaan pemberi dana, jemaat, dan seluruh pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana yang lebih profesional dan terbuka.

Menurut survey pada Gereja HKBP Kramat Jati, adanya penyajian laporan penerimaan dan pengeluaran Gereja HKBP Kramat Jati disajikan setiap minggu. Gereja HKBP Kramat Jati juga mencatat aset-asetnya dalam Microsoft Excel maupun nilai perolehannya. Tetapi Gereja HKBP Kramat Jati belum menggunakan *website* untuk menampilkan laporan penerimaan dan pengeluaran per tahun yang jelas.

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti terkait penerapan sistem berbasis *website* dalam menyusun laporan penerimaan dan pengeluaran gereja dengan mengangkat judul “Rancangan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Berbasis Website Pada Gereja HKBP Kramat Jati”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini akan menjawab pertanyaan, yaitu:

“Bagaimana rancangan laporan penerimaan dan pengeluaran kas berbasis *website* pada Gereja HKBP Kramat Jati?”

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pertanyaan yang disebutkan sebelumnya, sasaran yang ingin diraih dalam riset ini adalah sebagai berikut:

Untuk merancang laporan penerimaan dan pengeluaran kas berbasis *website* pada Gereja HKBP Kramat Jati.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini dilakukan dan memberikan manfaat:

a. Manfaat teoretis

- a) Menjadi acuan teoretis bagaimana lembaga keagamaan dapat mengadopsi teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan penerimaan serta pengeluaran.
- b) Menambah pemahaman akademis mengenai penerapan teknologi informasi berbasis web dalam mendukung pencatatan keuangan, sehingga dapat menjadi dasar penelitian lanjutan yang dikembangkan melalui Metode FAST.

b. Manfaat Praktis

- a) Membantu Gereja menyusun laporan penerimaan dan pengeluarannya menjadi lebih transparan kepada jemaat, khususnya dalam pengelolaan dana persembahan dan sumbangan lainnya.
- b) Mengurangi kesalahan manual, mempermudah pengarsipan, dan mempercepat proses pembuatan laporan penerimaan dan pengeluaran tahunan.
- c) Dengan laporan yang jelas dan terstandarisasi, kepercayaan jemaat dan calon donatur terhadap integritas pengelolaan keuangan gereja akan meningkat.